

Analisis Efektivitas E-Government Morena Dalam Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

Cahyantari Dewi Fitriani¹, Vidya Imanuari Pertiwi²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 23041010112@student.upnjatim.ac.id¹, vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 23 Maret 2026

Keywords: Efektivitas, E-Government, MORENA, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Abstract: Penelitian ini disusun untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan Morena dalam Pelaporan Dana Alokasi Khusus yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan teori efektivitas dari (Gibson dkk, 1989) dengan 5 indikatornya yaitu Produktivitas, Kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Morena sudah cukup efektif dalam proses Pelaporan Dana Alokasi Khusus di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Nganjuk, meskipun masih ada beberapa hambatan dan tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan dorongan perubahan yang lebih signifikan terhadap aplikasi Morena dengan menambahkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi dalam proses pelaporan agar pelaporan dana alokasi khusus (DAK) berjalan dengan lancar.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin krusial dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan. Pemerintahan masa kini diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk nyata dari penggunaan TIK merupakan fondasi utama dalam implementasi *E-Government* di pemerintahan. *E-Government* memungkinkan pemerintah mengelola layanan publik secara digital, sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan lebih efektif dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Di Indonesia, penerapan *E-Government* telah dimulai sejak diterbitkannya intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Sejak saat itu, berbagai regulasi pun muncul, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. (Williem, 2024)

E-Government mempunyai berbagai model layanan seperti *Government to Citizen* (G2C) yang dimana model ini memberikan layanan langsung kepada Masyarakat, seperti e-KTP, Dukcapil Online dan pengaduan menggunakan LAPOR! *e-government* jenis ini dapat meningkatkan aksesibilitas informasi publik dan pelayanan sehari-hari, *Government to Employee* (G2E) fokus dari *e-government* ini ialah pada pengelolaan pegawai seperti e-Kinerja, dan pelatihan

digital ASN. Manfaat dari *e-government* ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan kesejahteraan PNS. *Government to Government* (G2G) layanan ini mendukung koordinasi antarinstansi, contohnya seperti Morena untuk pelaporan dana alokasi khusus, e-Planning Bappenda, dan SPAN untuk anggaran. *Government to Business* (G2B) layanan ini memfasilitasi interaksi dengan pelaku usaha, seperti e-Perizinan yang tujuannya untuk mempercepat proses perizinan dalam pembukaan usaha. Namun, pengembangan dan penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan termasuk kesiapan sumber daya manusia. Implementasi *e-government* juga merupakan dari langkah menuju konsep *smart city* yang dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan publik. Morena termasuk ke dalam pelayanan *e-government* jenis *Government to Government*, karena aplikasi Morena memiliki hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memperlancar koordinasi tentang pelaporan Dana Alokasi Khusus.

Selain dalam konteks pemerintahan *E-Government* juga digunakan dalam tata kelola keuangan negara seperti Dana Alokasi Khusus merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. DAK ialah dana yang berasal dari APBN dan direalisasikan ke berbagai tempat guna mendukung pembiayaan kegiatan tertentu yang menjadi fokus utama negara termasuk dalam kepentingan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. DAK juga bagian dari TKD yang disalurkan untuk membiayai rencana kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi fokus utama serta mendukung operasional layanan publik. (Pajri Aprizal, Gina Azhara Nabilla. R & Elsa Ilmiah, Salsabilah Salwa Septiani, 2025) Penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya adalah mengurangi tanggung jawab biaya kegiatan tertentu yang menjadi beban pemerintah daerah. Penggunaan DAK difokuskan pada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik layanan publik yang memiliki masa manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan pengelolaan DAK untuk program tersebut, berharap mampu meningkatkan mutu pelayanan publik yang terealisasikan melalui belanja modal.

Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) memegang peranan penting dalam sistem pertanggungjawaban dan penilaian kinerja program yang berpengaruh tingkat akuntabilitas penggunaan dana pemerintah daerah. Kendala dalam proses pelaporan DAK meliputi perlunya pengembangan sistem yang dapat menyatukan data secara terpadu, meningkatkan ketepatan data yang disampaikan, serta mempercepat proses administratif, sambil tetap menjaga prinsip transparansi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui BKKBN telah meluncurkan aplikasi berbasis web yaitu Sistem Pelaporan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (MoreeNa) yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan DAK secara digital dan dikembangkanlah sebuah sistem yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual, serta memudahkan pengawasan kinerja program oleh pihak terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat menyajikan yang akurat dan terkini, sehingga dapat memperkuat pengambilan keputusan ditingkat pemerintahan daerah. Salah satu instansi yang mengimplementasikan aplikasi ini ialah Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti jaringan, web yang sering loding dengan lama. Oleh karena itu penelitian disusun agar mengetahui seberapa efektif penggunaan morena dalam proses menginput laporan dana alokasi khusus.

Beberapa peneliti terdahulu juga meneliti tentang Dana Alokasi Khusus dengan aplikasi web berbeda, menurut penulis aplikasi Morena ini masih belum efektif dalam merealisasikan DAK. Agar penggunaan aplikasi Morena menjadi lebih efektif jika digunakan untuk menginput realisasi

anggaran DAK oleh Dinas PPKB, maka dari itu tingkat efektivitasnya perlu dikateahui oleh BKKBN Pusat untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.(Hasyim, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan memberikan penjelasan secara rinci terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan mempelajari secara mendalam individu, kelompok, maupun fenomena terkait. Dalam penelitian ini, manusia berperan sebagai instrumen utaa, dan hasilnya berupa pertanyaan yang mencerminkan kondisi nyata serta mampu menjawab permasalahan yang diangkat (Hardani et al., 2020; Farras et al., 2023). Tujuan penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah untuk meneliti dan mengkaji realitas secara detail dan untuk memberi gambaran mengenai fakta yang ada mengenai MORENA yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, artikel, maupun penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Morena merupakan jenis aplikasi berbasis web, yang dikembangkan oleh BKKBN dan di implementasikan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk guna untuk mendukung proses pencatatan, pelaporan, perencanaan, pemantauan, serta evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama terkait dengan aspek fisik, non-fisik, dan penugasan seperti upaya penurunan angka stunting. Moreena menyediakan fasilitas untuk input perencanann Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didasarkan pada tahun, program kerja, dan triwulan, serta melakukan verifikasi data oleh admin provinsi sebelum dana di salurkan. Aplikasi ini juga mendukung pelaporan realisasi penggunaan dana, pengunggahan dokumen ke system aladin, serta integrasi data guna untuk menyinkronasi dengan SP2D netto dari DJPK Kemenkeu. Selain itu, fitur minotoring mencakup pencatatan hasil evaluasi dan rekapitulasi nasional guna memastikan transparansi. Morena menjamin pelaporan DAK yang akurat dan tepat waktu melalui input realisasi yang otomatis terintegrasi ke aladin, sehingga mengurangi kesalahan data dan mempercepat proses verifikasi penyaluran dana. Aplikasi ini juga mampu mendeteksi ketidaksesuaian seperti perbedaan pagu, sub kegiatan atau realisasi dengan APBN, melalui watermark sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penyerapan DAK nasional. Selain itu, Morena mulai digunakan sejak tahun 2023/2024 untuk mendukung digitalisasi birokrasi di BKKBN.(Hasyim, 2020)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama magang di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Penulis memperoleh peluang untuk mengimplementasikan Morena secara langsung.

Implementasi MORENA di Dinas PPKB

Sistem informasi berbasis aplikasi telah menjadi keharusan bagi beberapa lembaga karena mampu mendukung kelancaran proses operasional dalam suatu lembaga, serta mampu mengatur data agar lebih mudah di akses. Lembaga pemerintahan ialah DPPKB Kabupaten Nganjuk menerepkan pelaporan Dana Alokasi Khususnya memakai sebuah aplikasi berbasis web yang telah diluncurkan oleh BKKBN yang disebut MORENA. Aplikasi tersebut mampu mendukung kegiatan operasional terkait pelaporan yang dimiliki oleh Dinas PPKB. Aplikasi ini merupakan platform berbasis web yang saat digunakan memerlukan koneksi internet, dan untuk menggunakannya dibutuhkan username serta password. Pada Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk terdapat staf yang bertugas mengelola

.....

aplikasi Morena dibagian perencanaan. Bagian perencanaan memiliki tanggung jawab dalam melakukan koordinasi serta menyusun rencana kegiatan dan anggaran, mengembangkan kinerja, serta melakukan monitoring dan penilaian terhadap perencanaan. Selain itu, laporan mengenai DAK dari Kabupaten/Kota yang dikirim ke pusat akan terlebih dahulu diterimas dan dikoreksi oleh pihak provinsi yang berada di bawah pengawasan bagian perencanaan. Proses pelaporan aplikasi Morena dapat dibagi menjadi dua alur, yaitu:

Entri pagu Dana Alokasi Khusus merupakan tahap di mana dilakukan pengisian data terkait pagu Dana Alokasi Khusus. Pagu tersebut berfungsi untuk mengontrol dan mengetahui batas maksimal dana yang dapat dikeluarkan oleh Dinas PPKB. Saat proses input pagu dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena dikemudian hari realisasi dana tidak diperbolehkan melebihi jumlah pagu yang telah ditetapkan. (Hasyim, 2020)

Entri Perencanaan Alokasi Khusus, pada tahap ini perencanaan ini berfungsi untuk memilih kegiatan yang telah berhasil diselesaikan. Dinas PPKB diwajibkan melaporkan kegiatan yang telah terlaksana agar dapat disesuaikan jumlah anggaran yang telah diinputkan dengan jumlah kegiatan yang di masukkan. Mempunyai beberapa jenis menu yang disediakan untuk pemilihan program kerja. Selain itu, proses ini juga meliputi pengisian formulir perencanaan berdasarkan program kerja yang telah dipilih sebelumnya melalui ceklist, serta melakukan persetujuan oleh pihak-pihak terkait. (Hasyim, 2020)

Dalam hal ini penulis memiliki kesempatan untuk menginput dana realisasi sub kegiatan per bidang yang ada di Dinas PPKB. Staff Perencanaan menginput data pagu sesuai dengan kegiatan yang ada di Dinas PPKB. Menurut pengamatan penulis semua bidang yang ada di Dinas PPKB memiliki kerja sama tim yang sangat bagus sehingga penginputan data yang ada di Morena terealisasikan secara baik dan tepat pada waktunya.

Efektivitas MORENA Dalam Pelaporan DAK di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk

Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mengenai efektivitas penggunaan Morena sebagai aplikasi pelaporan Dana Alokasi Khusus. Disini peneliti memakai teori efektivitas menurut (Gibson dkk, 1989) dengan 5 indikator rfrktivitas diantaranya ialah: 1.) Produktivits, 2.) Kualitas, 3.) Efisiensi, 4.) Fleksibilitas, 5.) Kepuasan.(Zafirah et al., 2022)

A. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan organisasi dalam menghasilkan jumlah dan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari lingkungan sekitar. (Lia Septiliana, 2024) Menurut para informan produktivitas Morena dinilai Kurang Produktif karena dapat dilihat sisi kecepatan Morena masih bergantung pada kesiapan data dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem, tetapi penggunaan morena membantu beberapa bagian pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan dapat dilihat dari track record nya.

B. Kualitas

Kualitas ialah keadaan yang bersifat dinamis terkait dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan. (Lia Septiliana, 2024) Kualitas pada keakuratan data dalam pelaporan DAK sudah cukup efektif karena data relatif lebih terkontrol dan sistem memiliki format yang baku.

C. Efisiensi

Efisiensi adalah rasio yang membandingkan antara output dengan input. Efektivitas Morena berdasarkan indikator efisiensi dinilai sudah cukup namun masih belum optimal dari segi sumber daya sarana dan prasarana. (Lia Septiliana, 2024) Karena, masih diperlukan peningkatan pemahaman pengguna dari pelaksana kegiatan. Tetapi jika dilihat dari segi sumber daya manusia dinilai belum cukup efisien karena Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk memiliki keterbatasan dalam proses input data.

D. Fleksibilitas

Fleksibilitas sebagai kemampuan untuk merespons terhadap suatu organisasi atau perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. (Lia Septiliana, 2024) Menurut hasil wawancara setiap tahun Morena selalu mengalami perubahan dan dinilai kurang efektif, karena sebagian proses kerja harus dilakukan dua kali.

E. Kepuasan

Kepuasan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana organisasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. (Lia Septiliana, 2024) Berdasarkan hasil wawancara para staff merasa cukup puas dengan adanya Morena dalam pelaporan DAK.

Tantangan dan Hambatan Morena

Efektivitas pelayanan publik memasuki era *e-government* yang dilaksanakan oleh BKKBN yang di implementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah MORENA untuk membantu melaporkan Dana Alokasi Khusus yang dulunya menggunakan sistem manual. Meskipun sudah menggunakan pelaporan DAK dalam bentuk online tetapi dalam praktiknya masih ada tantangan dan hambatannya. (Kennedy et al., 2024) Tantangan dan hambatan yang ada pada penggunaan Morena diantaranya:

1. Akses internet, menjadi tantangan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Meskipun di Kabupaten Nganjuk sudah difasilitasi wifi oleh pemerintah, tetapi sinyal pada wifi tersebut sering eror dan menjadi hambatan dalam proses pelaporan DAK.
2. Akses web sering eror, hambatan ini sering terjadi dalam proses pelaporan bukan hanya karena kendala sinyal tetapi memang situs web nya yang kurang optimal. Hambatan ini menjadikan proses pelaporan menjadi lebih lama dan memakan banyak waktu.
3. Penginputan data, salah satu hambatan ini yang sering terjadi waktu penginputan data pelaporan DAK. Hal ini menjadi hambatan karena waktu proses penginputan pelaporan data yang dimasukkan harus satu satu ke dalam 284 desa dengan jumlah pagu dan realisasi yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *egovernment* melalui aplikasi Morena dalam proses pelaporan DAK di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk secara umum berjalan dengan cukup efektif meskipun terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang ada. Dengan adanya aplikasi Morena pelaporan DAK menjadi lebih sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan, penginputan data, verifikasi, hingga pelaporan secara online.

Jika ditinjau dari indikator efektivitas menurut Gibson dkk, Morena menunjukkan hasil yang kurang dalam hal produktivitas dan fleksibilitasnya karena proses penginputannya mengalami

keterlambatan dan jika mengalami perubahan pagu dan realisasi pengerjaannya menjadi dua kali. Jika dilihat dari segi kualitas, efisiensi, dan kepuasan para pengguna sudah merasa cukup puas. Dengan demikian *E-Government* Morena telah berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaporan DAK di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan terutama dalam kapasitas sumber daya manusia. Perbaikan tersebut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan Morena sehingga proses pelaporan DAK dapat berjalan lebih maksimal lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Efektivitas, K., Alokasi, D., & Dak, K. (2024). KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)*, 16(2), 145–158.
- Harahap, L. S.; A. (2024). EFEKTIVITAS IZIN ANGKUTAN KARYAWAN (KARTU PENGAWASAN) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUOATEN TABALONG. *JAPB*, 7(2014), 196–207.
- Harahap, M. D., & Trimurni, F. (2025). Kualitas Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam Pelayanan Administrasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. *Journal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(1), 295–312.
- Hasyim, F. R. (2020). *Penerapan sistem pelaporan dana alokasi khusus berbasis aplikasi morena*.
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134–147.
- Muhammad Reza Ridwansyah, Rudiana, T. R. H. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN EGOVERNMENT PADA APLIKASI JAKI (JAKARTA KINI) DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN SMART CITY DI DKI JAKARTA. *Jurnal*
-

- Admiinisrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 4(2), 225–237.
- Novalia, D., Etika, G., & Lubna, K. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 128–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>
- Rahmasari, F. (n.d.). *EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI KOTA BUKITTINGGI*.
- Taufiq, M. (n.d.). *EFEKTIVITAS APLIKASI SEKEJAB DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH PROVINSI JAWA ACEH*. 1–11.
- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat*. XVI(1), 26–30.
- Williem, A., Studi, P., Teknologi, M., & Politeknik, K. A. (2024). Literature review: effectiveness of website-based e government applications literature review: efektivitas aplikasi egovernment berbasis website. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(3), 599–605.
- Zafirah, A. H., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (n.d.). *Efektivitas Pelayanan Kependudukan Online Pada Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya*. 1–5.
- Hasyim, F. R. (2020). *Penerapan sistem pelaporan dana alokasi khusus berbasis aplikasi morena*.
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). *Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia Penulis : Email : Abstrak masyarakat modern khususnya di Indonesia , banyak hal yang awalnya dilakukan secara manual pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi membawa revolusi dalam interaksi antara warga dengan administrator pemerintahan . Penerapan e- Penelitian ini memberikan kebaruan dengan memanfaatkan studi kasus terkini dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah spesifik dalam penerapan e-government . Selain itu , penelitian ini melakukan analisis terhadap pendekatan studi kasus . Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kepentingan , analisis dokumen resmi , dan observasi langsung terhadap pelaksanaan program e-*. 4(2), 134–147.
- Lia Septiliana, A. H. (2024). Efektivitas Izin Angkutan Karyawan (Kartu Pengawasan) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(2014), 196–207.
- Pajri Aprizal, Gina Azhara Nabilla. R, S. N. K. I., & Elsa Ilmiah, Salsabilah Salwa Septiani, P. S. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH*. 13(4), 167–186.
- Williem, A. (2024). Literature Review: Effectiveness Of Website-Based E Government Applications. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(3), 599–605.
- Zafirah, A. H., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022). *Efektivitas Pelayanan Kependudukan Online Pada Bidang Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya*.
-